

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab I berisikan Latar belakang masalah bagaimana Aung San Suu Kyi dalam proses demokratisasi di Myanmar. Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### A. Latar Belakang Masalah

Myanmar merupakan negara kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 60 juta jiwa. Konsep dan pelaksanaan politik luar negeri Myanmar dikendalikan oleh pemerintah junta militer yang berkuasa sejak tahun 1962. *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) merupakan kelompok elit politik dan militer tingkat tinggi Myanmar, yang mendominasi kebijakan politik luar negeri dan dalam negeri Myanmar serta tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam mengurus keamanan nasional.<sup>1</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri Myanmar yakni.

*Pertama*, yaitu faktor sejarah. Myanmar, yang dulu bernama Burma, dipenuhi dengan perang tanpa henti. Lahirnya negara Myanmar terbentuk dengan cara tradisional dimana saat itu sedang berlangsung peperangan antar kelompok. Selain itu, Myanmar pada masa lalu juga dihadapkan dengan invasi dari luar yang dilakukan oleh pasukan Mongol, Cina, dan juga Inggris. *Kedua*, era modern, Myanmar dihadapkan dengan beban untuk mempertahankan kekuasaan dari pemerintahan Jepang dan perang saudara yang tak pernah berhenti. Perang saudara yang terus-menerus terjadi membuat kondisi keamanan nasional negara Myanmar penuh dengan beban dan upaya untuk mempertahankan

---

<sup>1</sup> Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 157-158

kesatuan nasional dari ancaman dalam maupun luar negeri. *Ketiga*, letak geografi. Myanmar memiliki batas wilayah dengan lima Negara, dua diantaranya adalah negara besar yaitu India dan Cina. *Keempat*, adalah bermacam- macam etnis, budaya, dan agama di Myanmar, tetapi ada satu etnis mayoritas di Myanmar yakni etnis Bamar yang memiliki populasi sebesar 69% dari seluruh penduduk di Myanmar.<sup>2</sup>

Konstitusi nasional yang dibuat pada tahun 1947 menetapkan sistem pemerintahan parlementer di Myanmar. Pada saat itu, Myanmar pada saat dibawah pemerintahan perdana menteri U Nu, menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis dengan menerapkan sistem demokrasi parlementer.

Strategi pembangunan *Pydawtha* (negara yang makmur), U Nu berusaha menyelesaikan permasalahan di dalam negerinya.<sup>3</sup> Namun strategi penerapan *Pydawtha* tersebut akhirnya mengalami kegagalan. Terjadinya korupsi pada jajaran pemerintah menimbulkan perang saudara dan pemberontakan etnis yang memberikan dampak kemacetan inflasi pada tahun 1950.<sup>4</sup>

Jendral Ne win yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan U Nu pada tahun 1962. Yang mana kudeta tersebut membuat pemerintahan militer mengambil alih pemerintahan dan menggeser pelaksanaa sistem demokrasi parlementer yang sudah dilaksanakan sejak kemerdekaan dari Inggris 4 januari 1948. Sejak perpindahan kekuasaan dari demokrasi parlementer ke pemerintahan militer, seluruh aspek kehidupan yang ada di Myanmar diambil alih oleh junta militer. Davis I. Steinberg menyebut Myanmar sebagai *the most monolithically military controlled in the world*. Dikarenakan kondisi pemerintahan Myanmar yang sangat

---

<sup>2</sup> Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 158

<sup>3</sup> David I Steinberg, *Burma; A Socialist of Southeast Asia* (colorado : Westview Press, 1982) Hal 45.

<sup>4</sup> Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Indonesia, *Kerjasama ASEAN dalam Upaya Menuju Terbentuknya mekanisme HAM ASEAN* (Jakarta : Sekretariat : 2007) Hal. 2.

dikendalikan oleh junta militer dalam semua aspek kehidupan.<sup>5</sup>

Junta militer yang dipimpin oleh Jendral Ne Win cenderung membuat negara Myanmar lebih menutup diri dari dunia internasional, karena Jendral Ne Win menerapkan kebijakan isolasi untuk Myanmar. Junta militer juga menerapkan ideologi sosialisme “*Burmese Way to Socialism*” sebagai dasar pemikiran pemerintah dalam sistem politik dan ekonomi Myanmar. Selain itu pemerintahan junta militer dibawah kepemimpinan Jendral Ne Win juga hanya mengakui satu partai politik yakni *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) yang mana mayoritas anggota partai tersebut adalah anggota militer. Kebijakan lain dari Jendral Ne Win adalah menghapus semua partai yang ada di Myanmar yang tidak sesuai dengan ideologi pemerintah junta militer.<sup>6</sup>

Dalam bidang ekonomi, keputusan yang diambil pemerintah junta militer terlihat dari pengambilan keputusan yang tidak memperhatikan kondisi dari masyarakat Myanmar. Pada tahun 1998 junta militer mengeluarkan kebijakan yang dirasa memberatkan masyarakat yaitu penurunan nilai mata uang, yang menyebabkan uang kertas dengan nilai besar tidak berlaku lagi di Myanmar. Dari kebijakan tersebut banyak masyarakat yang kehilangan tabungan yang mereka miliki. Masyarakat yang kecewa dengan kebijakan pemerintah junta militer melakukan aksi protes dengan cara demonstrasi pada tanggal 8 agustus 1988, aksi demonstrasi yang dilakukan karena tidak puasnya masyarakat dengan kinerja junta militer selama memimpin Myanmar dan masyarakat menilai junta militer telah gagal dalam menjalankan pemerintahan. Masyarakat juga menuntut agar diubahnya sistem pemerintahan yang sekarang ke sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang tidak terima dengan aksi

---

<sup>5</sup> M. Adian Firmas, “Prospek demokrasi di Myanmar”, *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.2 No.2 (2003): Hal. 130-133

<sup>6</sup> Hnin Yi, “The Political Role of the Military in Myanmar” (Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS) Working Paper, Asia Pacific University, 17 januari 2014), Hal 10-11

demonstrasi masyarakat akhirnya turun tangan membubarkan para demonstran dengan cara kekerasan yang menewaskan 3000 demonstran. Peristiwa tersebut dikenal dengan *Uprising8888*.<sup>7</sup>

Kendali penuh yang dilakukan oleh junta militer terhadap seluruh aspek kehidupan yang ada di Myanmar kurang lebihnya banyak merugikan bagi masyarakat, pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh pemerintah junta militer, junta militer juga menangkap tokoh pro demokrasi Myanmar akibat dari kemenangan partai oposisi di pemilu Myanmar tahun 1990. Aksi dari junta militer ini menimbulkan banyak kecaman dari dunia internasional yang menganggap junta militer sudah keterlaluan dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Sanksi banyak diberikan dari dunia internasional buat Myanmar, seperti memberhentikan semua bantuan dan pinjaman kepada pemerintah junta militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Uni Eropa bahkan memberikan sanksi kepada pemerintah junta militer berupa larangan memberikan visa kepada pejabat pemerintah Myanmar yang ingin melakukan kunjungan ke Uni Eropa.<sup>8</sup>

Aung San Suu Kyi yang kecewa atas tindakan dari junta militer yang begitu brutal membantai para demonstran memutuskan untuk terjun kedalam politik pertamanya di Myanmar. Aung San Suu Kyi merupakan tokoh perempuan dalam demokratisasi di Myanmar yang menentang keras terhadap aksi junta militer Myanmar, Pada tahun 2010 pemerintah Myanmar mengadakan pemilu yang menghasilkan Thein Sein sebagai presiden. Thein Sein berasal dari partai Union Solidarity and Development Party (USDP), merupakan pensiunan jenderal yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri. Meskipun dibawah kepemimpinan Thein Sein,

---

<sup>7</sup> Mohamad Faisol Keling, "A Historical Approach to Myanmar's Democratization Process", *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol. 1 No.2 (2010): hal 141-142

<sup>8</sup> Ravi Mirza Fitri, "Dukungan India terhadap Junta Militer Myanmar (2004-2009) : Kerjasama ekonomi dan Rivalitas dengan China", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Vol 3 No 1 : hal 530

Hegemoni militer didalam pemerintahan Myanmar tidak dapat hilang, karena Thein Sein bukan sepenuhnya berasal dari kalangan sipil. Akan tetapi prospek reformasi situasi politik di Myanmar mengalami kemajuan. Thein Sein memiliki empat tujuan utama dalam memperbaiki situasi di negaranya, yaitu : memperbaiki hubungan dengan NLD dan Aung San Suu Kyi, mengatasi konflik antar etnis, mengatasi krisis ekonomi dan memperbaiki hubungan Myanmar dengan dunia internasional. Hal ini ditunjukkan dengan bukti dibebaskannya tahanan-tahanan politik rezim militer termasuk Aung San Suu Kyi, Thein Sein juga mengadakan dialog dengan Suu Kyi dan memberinya kursi diparlemen, walaupun kehadiran NLD diparlemen masih dianggap simbolis karena USDP masih tetap mendominasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut :”Bagaimana peran Aung San Suu Kyi dalam proses Demokratisasi di Myanmar?”

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Teori Demokratisasi**

Laurence Whitehead memandang demokratisasi sebagai sebuah proses panjang yang ujungnya tidak dapat diprediksi . Demokratisasi ini terjadi di negara-negara Dunia Ketiga dan memiliki perbedaan dengan demokratisasi yang terjadi di negara-negara Dunia Barat. Walaupun secara umum, demokratisasi dianggap sebagai proses transisi dan perubahan dari negara otoriter menjadi negara yang demokratis. Whitehead sendiri merasa bahwa demokratisasi adalah sebuah konsep yang rumit, dimana tujuan akhirnya adalah demokrasi, sebab konsep ini sangatlah dinamis.

Demokratisasi yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga terdapat lebih dari satu titik awal, lebih dari satu kemungkinan rute, serta terdapat pengaruh dari berbagai konteks internasional/ nasional dalam proses demokratisasi. Maka dari itu prediksi terhadap hasil/ tahap selanjutnya dari demokratisasi menjadi tidak pasti, maka dari itu butuh dilakukan studi komparatif demokratisasi gelombang ketiga secara empiris.

Menurut Robert Dahl, ada dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi yang pertama, harus tersedianya ruang persaingan terbuka untuk mendapat semua kedudukan dan kekuasaan politik. Kedua, pada saat yang bersamaan harus tersedia juga ruang aktivitas yang cukup dengan jaminan yang memadai bagi seluruh warga negara. Selain itu, Dahl berpendapat bahwa demokrasi politik merupakan respon Pemerintah terhadap preferensi yang dipilih oleh warga negaranya, Dahl menekankan demokrasi politik pada tiga hal yaitu: kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik. Yang pada kesimpulannya adalah intisari dari demokrasi dapat diukur dari pemilihan yang bersifat umum bebas dan setara.

Selain itu Robert Dahl berpendapat bahwa demokrasi politik merupakan respon pemerintah terhadap preferensi yang dipilih oleh warga negaranya. Dahl menekankan demokrasi politik pada tiga hal yaitu : kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik.

Proses transisi demokratisasi di Myanmar di bawah bayang-bayang Rezim Militer yang sudah berkuasa lebih dari 45 tahun. Junta Militer yang dipimpin Jendral Than Shwe berusaha untuk melanggengkan pemerintahan militer, demi kepentingan agar rezim militer tetap berkuasa. Proses demokratisasi Myanmar masih tidak jelas.

Peran biksu Dalam kebudayaan dan masyarakat Myanmar, sebagai orang yang mendalami agama sangat dihormati dan tetap dimuliakan, karena para biksu sudah menjauhi hal- hal yang bersifat duniawi. Para biksu yang keluar meninggalkan kuil karena mereka merasakan

penderitaan masyarakat Myanmar yang hidup dalam tekanan junta militer yang sangat otoriter.

Biksu mendapatkan tempat terhormat di Myanmar karena 85% penduduk Myanmar menganut agama budha. Biksu bukan hanya memainkan perannya dalam spritual namun juga memiliki sejarah sebagai aktivis politik.

Dinamika politik yang terjadi membuat kondisi di Myanmar menjadi kurang stabil. Demokratisasi di Myanmar menjadi salah satu yang diperjuangkan oleh Aung San Suu Kyi. Sementara itu, kehidupan politik di Myanmar dipengaruhi oleh desakan dari para biksu dan aktifis NLD, yang dimana para biksu ingin pergantian pemerintahan berlangsung dengan damai, sedangkan para aktivis NLD ingin kemenangan demokrasi harus lebih diperdalam sehingga membersihkan politik Myanmar dari pemerintahan Junta.

Tekanan dari dunia internasional terutama dari PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa yang menginginkan pemerintah membuka proses demokrasi di Myanmar. Selain itu krisis ekonomi yang terjadi di Myanmar memaksa junta militer untuk lebih hati-hati dalam melakukan aksi kekerasan.

Dinamika kehidupan ekonomi dan politik masyarakat Myanmar secara umum berpengaruh pada proses transisi, demokratisasi itu sendiri. Masyarakat Myanmar selama ini merasa tidak puas terhadap perkembangan kondisi politik dan ekonomi yang semakin memburuk. Masyarakat Myanmar selama ini gencar melakukan demonstrasi besar-besaran yang mendapatkan dukungan dari kelompok oposisi Liga Nasional Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi menjadi tokoh utama dalam partai tersebut. Hingga pada tahun 1988 demonstrasi besar-besaran tersebut menyebabkan Jendral Ne Win mengundurkan diri. Kemudian digantikan Jendral Sein Lwin yang justru melakukan tindakan kekerasan yaitu tindakan pembantaian terhadap kelompok demonstran. Pada tahun 1988 Jendral Sein Lwin mengundurkan diri dan digantikan oleh Jendral Sauw Maung yang kemudian menyelenggarakan Pemilu, namun tetap mengesahkan Undang-Undang Darurat dan menutup Konstitusi 1974.

Dinamika politik tahun 1990 yang mempengaruhi proses transisi demokrasi, ditandai dengan kemenangan partai NLD dalam pemilu 1990, karena mampu menggalang dukungan dari 2 juta penduduk Myanmar selama masa kampanye. Kemenangan kelompok oposisi yang jelas mengancam eksistensi pemerintahan Junta Militer yang berkuasa selama ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran dari kubu pemerintah yang kemudian membuat Jendral Saw Maung secara sepihak tidak mengakui hasil pemilu dan memenjarakan sejumlah besar anggota NLD. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum militer dan pembatalan pemilu 1990, telah memunculkan isu pelik transisi demokratisasi di Myanmar, pelanggaran HAM terhadap tokoh-tokoh demokrasi terutama Aung San Suu Kyi dan kaum minoritas sebagai isu internasional. Pemilu 1990 bisa dikatakan sebagai tonggak utama dalam upaya proses transisi demokratisasi di Myanmar. Tetapi, junta militer menolak hasil pemilu dan justru semakin berusaha untuk mempertahankan kediktatorannya secara represif.

Junta militer tahun 2011 resmi dibubarkan dan parlemen sipil dibentuk, dimana menunjuk perdana menteri Thein Sein sebagai presiden. Banyak perubahan yang dilakukan pemerintahan. Thein Sein menunjukkan adanya reformasi dan memperlihatkan keterlibatan dunia internasional.

Thein Sein melakukan perubahan dengan membebaskan para tahanan politik, pembentukan komisi nasional hak asasi manusia. April 2012 Aung San Suu Kyi setuju untuk ikut pemilu untuk mengisi kekosongan. NLD mendominasi dengan menang 44 kursi dari 46 kursi. Dunia internasional mulai melakukan hubungan baik Myanmar. Seperti, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Jepang yang sempat menjatuhkan sanksi ekonomi mencabut sanksi



tersebut dan mulai menunjukkan minat untuk melakukan investasi di Myanmar.<sup>9</sup>

Meskipun Thein Sein sudah mengurangi peran junta militer, tetapi militer masih memainkan peran dalam pemerintahan karena militer memiliki jatah kursi sebanyak 25% di parlemen, yang membuat mereka mendapat hak veto dan setiap kebijakan yang dinilai merugikan mereka atau menunggu stabilitas negara.

## 2. Konsep Motivasi

Motivasi berasal dari kata motif (motive) yang artinya dorongan, daya pendorong atau tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak.

Motivasi juga berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan perbuatan yang berlangsung secara sadar.<sup>10</sup>

Beberapa pengertian dari motivasi menurut para ahli :<sup>11</sup>

### a. Mathis & Jackson (2006)

Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu tindakan. Seseorang melakukan tindakan untuk sesuatu hal dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, motivasi merupakan penggerak yang mengarahkan pada tujuan dan itu jarang muncul dengan sia-sia.

### b. Robbins (2003)

---

<sup>9</sup> <http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field-document/20150226Myanmar.pdf> diakses pada tanggal 11 desember 2018 pukul 21.11

<sup>10</sup> Rahmadianty (2015). *Konsep- Konsep Motivasi*. Dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia “Bekasi”.

[https://www.academia.edu/20399097/Makalah\\_Konsep\\_Motivasi](https://www.academia.edu/20399097/Makalah_Konsep_Motivasi). Hal 2. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018

<sup>11</sup> *Ibid*. Hal 2

Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas individu, arah, dan ketekunan dalam upaya untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian diatas, motivasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan dorongan semangat, kekuatan, arahan kepada seseorang dalam upaya mencapai tujuan. Dari pengertian motivasi terlihat bahwa ada tiga hal yang termasuk di dalamnya antara lain, upaya, tujuan, dan kebutuhan.<sup>12</sup>

Aung San Suu Kyi tokoh perjuangan dalam proses demokratisasi di Myanmar yang berjuang melawan pemerintah junta militer. Aung San Suu Kyi menerapkan perjuangan tanpa kekerasan yang dia pelajari dari filsuf asal India Mahatma Gandhi.

Tanggal 26 Agustus 1988 di depan pagoda Shwedagon, Aung San Suu Kyi terjun pertama kali dalam dunia politiknya di Myanmar. Meskipun hampir separuh hidupnya dihabiskan dengan menjadi tahanan rumah, tetapi semangat juangnya tidak pernah surut demi terciptanya pemerintahan yang demokrasi di Myanmar. Aung San Suu Kyi melakukan perjuangannya dengan cara tulisan- tulisan yang dia tuangkan atau berbicara secara langsung dihadapan masyarakat Myanmar dengan cara berpidato.

Aung San Suu Kyi dipercaya masyarakat untuk memimpin perjuangan pro demokrasi bukan karena nama besar sang ayah, tetapi juga karena kematangan dan kemampuan Aung San Suu Kyi dalam membangun semangat juang masyarakat.

Aung San Suu Kyi melakukan aksi mogok makan dalam upaya membebaskan para pendukungnya dari siksaan

---

<sup>12</sup> Rahmadianty (2015). *Konsep- Konsep Motivasi*. Dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia “Bekasi”.  
[https://www.academia.edu/20399097/Makalah\\_Konsep\\_Motivasi](https://www.academia.edu/20399097/Makalah_Konsep_Motivasi). Hal 2. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018

junta militer. Aksi Aung San Suu Kyi mendapatkan respon yang positif dari perwira angkatan militer bahwa para pendukungnya tidak akan disiksa dan diproses melalui jalur hukum.

Aung San Suu Kyi turut aktif dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi dinegerinya kepada PBB dan juga para seluruh duta besar di dunia agar memberikan perhatian terhadap penindasan dan kekerasan yang dialami Masyarakat. Perjuangan tersebut dilakukan Aung San Suu Kyi dengan cara tulisan- tulisan dengan tujuan sebagai membangun semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia. Aung San Suu kyi juga menulis sebuah buku yaitu *Letters From Burma*, dalam buku tersebut ditulis berdasarkan kepedulian Aung San Suu Kyi terhadap nasib rakyat Myanmar.

Atas tindakan- tindakan tersebut Aung San Suu Kyi dianggap pemerintah junta militer menentang kekuasaan pemerintah, tapi Aung San Suu Kyi melakukan itu semua demi demokrasi di Myanmar.

### **3. Teori Peranan**

Peranan (Role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.<sup>13</sup>

Teori Peranan menegaskan bahwa “perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik”.<sup>14</sup> Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Menurut John Wahlke,

---

<sup>13</sup> Mas’oed, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi* . Yogyakarta: Pusat Antar Studi sosial Universitas Gadjah Mada. Hal 44

<sup>14</sup> Mas’oed, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi* . Yogyakarta: Pusat Antar Studi sosial Universitas Gadjah Mada. Hal 44

teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi, kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teorisasi peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian, teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi peranan, kita masih bisa membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti peranan. Dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang membentuk institusi. Dalam kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.<sup>15</sup>

Seperti tersirat dalam uraian di atas, teori peranan berasumsi bahwa aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari posisi sebagai presiden, menteri luar negeri, anggota DPR, atau warga biasa, yang masing-masing posisi itu memiliki pola perilaku tersendiri. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan (expectation) itulah yang membentuk suatu peranan.<sup>16</sup>

Darimana datangnya harapan itu menurut Isaak, harapan itu bisa muncul dari dua jenis sumber. *Pertama*, itu bisa

---

<sup>15</sup> Mas' oed, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Gadjah Mada. Hal 44-45

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal 45

berasal dari harapan yang dipunyai orang lain terhadap seorang aktor politik. Artinya, setiap masyarakat pasti memiliki suatu gagasan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aktor politik. *Kedua*, harapan juga bisa muncul dari cara yang dilakukan oleh pemegang peran yang dapat menafsirkan peranan yang dipegang olehnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Orang yang menjadi presiden memang mempertimbangkan harapan orang lain terhadap perannya, tetapi ia juga memiliki gagasan sendiri tentang peranan yang harus dimainkannya. Gagasan ini sebagian besar mencerminkan sikap, ideologi, dan kepribadian yang dikembangkan sebelum ia memegang peran itu.<sup>17</sup>

Kepemimpinan Kharismatik adalah kepemimpinan berdasar kemampuan luar biasanya yang melekat pada seseorang. Menawarkan pandangan cemerlang untuk mengatasi krisis saat itu. Memberikan inspirasi atau pencerahan sehingga dicintai pengikutnya.<sup>18</sup>

Aung San Suu Kyi, anak dari jenderal Aung San, seorang pahlawan nasional Myanmar yang melihat keadaan rakyat yang semakin menderita Aung San Suu Kyi tergerak hatinya untuk segera membantu Myanmar dalam memecahkan persoalan yang tengah dihadapi dalam negerinya. Dasar perjuangan dalam menegakkan demokrasi mengacu pada perjuangan yang telah dilakukan oleh Jenderal Aung San semasa hidupnya.

Spirit Aung San Suu Kyi berakar dari pondasi kebudayaan Myanmar yakni agama Budha tradisional dari timur. Sedangkan yang menginspirasi spiritualnya ialah Mahatma Gandhi sang filsuf anti kekerasan India, dan ayahnya sendiri yakni Aung San pemimpin perjuangan kemerdekaan Myanmar.

---

<sup>17</sup> Mas' oed, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisis*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Gadjah Mada . Hal 45

<sup>18</sup> DR. Jatmika, Sidik, M.si. *Dasar- Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 58

Aung San Suu Kyi aktif dalam melakukan berbagai demonstrasi dan memimpin aksi protes tanpa kekerasan. Pidato pertamanya diucapkan dalam bahasa Myanmar di depan rapat umum di lapangan sebelah barat Pagoda Shwedagon pada tanggal 26 Agustus 1988. Aung San Suu Kyi yang sedang berusaha untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Myanmar, Aung San Suu Kyi terinspirasi dari kajian serta pencerminan falsafah Gandhi, Yakni pembangkangan rakyat tanpa kekerasan serta memberikan inspirasi melalui pidato-pidatonya di seluruh negeri.

Aung San Suu Kyi juga aktif menyuarakan pelanggaran HAM di negerinya kepada PBB dan para duta besar di seluruh dunia agar dapat memberikan perhatian terhadap penindasan dan kekerasan yang dialami rakyat Myanmar. Perjuangannya pun dilakukan melalui tulisan- tulisan sebagai pembangun semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada tahun 1988 tiga orang oposisi Pemerintah yaitu Aung Gyi, Tin U dan Aung San Suu Kyi mendirikan partai *National League for Democracy* (NLD) Tanggal 24 September 1988 resmi terbentuk. Aung San Suu Kyi yang menjabat sebagai sekretaris umum. NLD sendiri adalah partai pro demokrasi yang mendukung gerakan- gerakan non- kekerasan terhadap demokrasi multi- partai di Myanmar. Partai ini juga mendukung hak asasi manusia termasuk kebebasan berpidato dimuka umum, aturan hukum, dan rekonsiliasi nasional.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan Kerangka pemikiran di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara yakni, peran Aung San Suu Kyi dalam Proses Demokratisasi di Myanmar adalah Motivator bagi masyarakat Myanmar dalam menciptakan demokrasi di Myanmar.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini lebih banyak didukung literasi kepastakaan dalam teknik pengumpulan data yang terkait dengan judul penelitian, sehingga eksplorasi data bersifat studi kepastakaan (Library Research). Oleh sebab itu, pengumpulan data penelitian akan dilakukan melalui kajian literasi seperti media pustaka, majalah, surat kabar, jurnal, dan sumber data lainnya.

Sedangkan untuk mendapatkan data up to date, akan banyak didukung melalui persediaan data yang ada di internet maupun sumber lain yang diyakini masih mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang dikaji.

Metode analisis data- data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, kemudian menggambarkan hubungan antara lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penulisan, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini penulis membatasi kajian mengenai “Peran Aung San Suu Kyi dalam proses demokratisasi di Myanma” mulai dari tahun 1988 sampai tahun 2015. Tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan data sebelum dan setelah tahun tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini secara keseluruhan di susun berdasarkan per bab yang selanjutnya akan dibagi ke dalam sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan jenis masalah dalam pembagian bab-babnya. Sedangkan dalam sub-subnya dimaksudkan untuk menguraikan isi dari tiap-tiap bab secara terperinci. Sehingga diharapkan akan memperoleh suatu permasalahan secara menyeluruh.

BAB I, meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, hipotesa, kerangka konseptual, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Membahas tentang Aung San Suu Kyi, Latar belakang Aung San Suu Kyi, Dan lain- lain.

BAB III, Membahas tentang pemerintah otoriter Myanmar, sejarah Junta militer dan juga Presiden Myanmar, dan proses demokratisasi di Myanmar.

BAB IV, membahas tentang peran Aung San Suu kyi dalam demokratisasi di Myanmar.

BAB V, Berisi kesimpulan dan penutup